

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Terjadinya kasus kegagalan audit belakangan ini, telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat akibat ketidakmampuan profesi akuntansi dalam mengaudit laporan keuangan. Sebagai contoh, kasus yang dimuat pada media online (<http://regional.kompas.com>) mengenai “Kredit Macet Rp.52 Miliar, Akuntan Publik Diduga Terlibat”, dimana seorang akuntan publik bernama Biasa Sitepu yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp. 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada tahun 2009, diduga terlibat kasus korupsi kredit macet. Atas kejadian itu, ia menghadapi dakwaan konspirasi, kecurangan hingga pemalsuan. Untuk mencegah terjadinya kasus kegagalan audit, maka auditor dituntut untuk bersikap profesional. Sikap profesionalisme auditor dapat dicerminkan oleh ketepatan auditor dalam membuat audit judgment dalam penugasan auditnya (Idris, 2012). Sehingga, masyarakat menuntut sektor publik khususnya pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai bentuk terwujudnya praktik good governance. Pengguna laporan keuangan mengharapkan adanya laporan keuangan yang dapat dipercaya, lengkap dan benar sehingga dapat dijadikan dasar untuk

pengambilan keputusan. Seorang auditor dalam melakukan tugasnya membuat *audit judgement* dipengaruhi oleh banyak faktor, baik bersifat teknis ataupun non teknis.

Menurut Mardiasmo (2005) dalam Ariyantini et al (2014) ada tiga aspek yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pertama, pengawasan adalah kegiatan pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua, pengendalian (*control*) adalah kegiatan pihak eksekutif untuk menjamin kebijakan dan sistem manajemen agar dilakukan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. Ketiga, pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan pemeriksaan tentang hasil kinerja pemerintah terkait kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Audit yang dilakukan ini biasa disebut dengan audit sektor publik.

Menurut Bastian (2014) audit sektor publik merupakan audit yang dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba, seperti sektor pemerintahan daerah (pemda), BUMN, BUMD dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan Negara. Pada sektor publik, pihak yang melakukan audit adalah BPK atau akuntan publik atas penunjukan BPK, yang melakukan audit sesuai dengan kode etik profesi dan standar yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, mengamanatkan pemeriksaan keuangan negara kepada sebuah lembaga negara yang independen, yaitu BPK. BPK

berkedudukan di tingkat pusat dan tingkat daerah. Pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK bertujuan untuk menjamin kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut UU No 15 Tahun 2006 salah satu tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Sebagai auditor pemerintah yang independen harus mampu menjadi auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh entitas yang diperiksa (Nadirsyah, et al. 2011).

Hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan DPR atau DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang independen terdiri dari sembilan anggota yang dipilih oleh DPR sebagai wakil rakyat, anggota BPK diresmikan dengan keputusan Presiden. Syarat calon anggota BPK diatur dalam peraturan BPK RI No.1 tahun 2007.

Sejak tahun 1994, BPK telah mengeluarkan Standar Audit Pemerintahan yang dikenal dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP), sebagai pedoman bagi semua auditor sektor publik dalam melaksanakan tugas auditnya. Selain SAP, di lingkungan BPK selama ini telah juga dikenal yang namanya Sapta Prasetya Jati BPK dan Ikrar Pemeriksa,

merupakan pedoman bagi pegawai BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

Auditor merupakan seseorang yang profesional dalam melaksanakan tugasnya, sebagai seorang yang profesional seorang auditor harus berpegang pada tanggungjawab profesinya. Tanggung jawab profesinya bukan hanya memberikan opini atas kewajaran suatu laporan keuangan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap hasil auditnya, oleh karena itu, auditor harus berhati-hati di dalam melaksanakan tugas auditnya dan menetapkan judgment yang akan diberikannya.

Seorang auditor harus mengumpulkan serta mengevaluasi bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendukung *judgement* yang diberikannya di mana bukti-bukti tersebut memberikan dasar yang rasional dalam membentuk *judgement*. Apabila auditor tidak berhati-hati dalam menentukan pertimbangannya, kesalahan dalam pernyataan pendapat dapat saja terjadi. *Audit judgement* sangat penting dalam audit. Dalam standar profesi akuntan publik (SPAP), seorang auditor diharuskan menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam memberikan penilaian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan audit. Semakin akurat audit judgment yang dihasilkan auditor maka kualitas dari hasil auditnya akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan judgment yang dibuat auditor adalah sebuah pertimbangan subyektif dari auditor dan sangat tergantung dari persepsi individu mengenai suatu situasi (Lopa, 2014 dalam Drupadi dan Sudana, 2015). Oleh karena itu, penting untuk memperoleh

pemahaman tentang perilaku auditor dalam memproses informasi untuk membuat *audit judgement* (Liburd, 2015 dalam Drupadi dan Sudana, 2015).

Audit judgement merupakan suatu pertimbangan atas persepsi dalam menanggapi informasi laporan keuangan yang diperoleh, ditambah dengan faktor faktor dari dalam diri seorang auditor, sehingga menghasilkan suatu dasar penilaian dari auditor (Tantra, 2013) dalam Drupadi dan Sudana (2015). Paragraf 16 SA200 menyebutkan pada saat merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil audit atas laporan keuangan, auditor harus menggunakan pertimbangan profesionalnya. Menurut Pranoto (2013) dalam Drupadi dan Sudana (2015), *judgement* merupakan persepsi auditor dalam menanggapi informasi yang berhubungan dengan resiko audit yang akan dihadapi auditor dan mempengaruhi pemberian opini auditor dari laporan keuangan suatu entitas. *Audit judgement* dapat dikatakan ikut menentukan hasil dari pelaksanaan audit.

Pembuatan *audit judgement*, auditor menggunakan proses audit yang sistematis dan ketat yang melibatkan dua kegiatan dasar, yaitu mengumpulkan serta mengevaluasi bukti-bukti dan informasi (Ashton, 1974 dalam Drupadi dan Sudana 2015). Judgment dapat berubah tergantung informasi dan bukti yang diberikan sebagai pertimbangan baru yang dapat digunakan oleh auditor (Tantra, 2013).

Pentingnya peran auditor dalam menilai suatu laporan keuangan, maka perlu diketahui faktor faktor apa saja yang mempengaruhi auditor dalam membuat *audit judgement*. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam pembuatan *audit judgement* diantaranya: tekanan ketaatan, pengalaman audit, skeptisme, insentif kerja, dan persepsi etis. Faktor tekanan ketaatan adalah jenis tekanan pengaruh sosial yang dihasilkan ketika individu dengan perintah langsung dari perilaku individu lain Reni dan Dheane (2015:03) dalam Rosadi dan Riza (2017). Tekanan ketaatan dapat diterima dari atasan maupun klien. Tekanan ketaatan yang diterima dapat memberikan pengaruh buruk bagi auditor. Auditor yang berada di bawah tekanan ketaatan perintah atasan maupun klien untuk berperilaku menyimpang, yaitu mempunyai kecenderungan untuk melakukan perintah tersebut. Semakin tinggi tekanan yang dihadapi oleh auditor maka *judgement* yang diambil oleh auditor cenderung kurang tepat sehingga dapat mempengaruhi auditor dalam membuat suatu *judgement* Reni dan Dheane, (2015:06) dalam Rosadi dan Riza (2017).

Faktor pengalaman auditor dalam melaksanakan suatu tugas yang kompleks, usaha tidak dapat secara langsung atau kuat berpengaruh pada kinerja. Ketika tugas yang dihadapi lebih kompleks dan tidak terstruktur, usaha yang tinggi tidak akan membantu seorang auditor untuk menyelesaikan tugas audit. Auditor juga harus meningkatkan kompetensinya yaitu dengan menambah keahlian dan pengalaman auditnya. Auditor harus memiliki pengetahuan pengauditan (umum dan

khusus), pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri entitas yang diperiksa (Zulaikha, 2006). Menurut Mayangsari (2003), auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik atas laporan keuangan. Susetyo (2009) menyatakan bahwa pengalaman akan mengurangi pengaruh informasi yang tidak relevan dalam *judgement* auditor. Auditor yang berpengalaman dalam membuat suatu *judgement* tidak mudah dipengaruhi oleh kehadiran informasi yang tidak relevan.

Faktor skeptisme profesional sebagai sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor tidak boleh menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak boleh menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi. Auditor juga tidak boleh merasa puas dengan bukti-bukti yang kurang persuasif karena keyakinannya atas kejujuran manajemen. Skeptisme profesional seorang auditor dibutuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan tentang seberapa banyak serta tipe bukti audit seperti apa yang harus dikumpulkan (Arens, 2008).

Faktor Pemberian insentif kinerja, bertujuan untuk memperbaiki dan menambah motivasi untuk melaksanakan usaha dan pengaruhnya terhadap kinerja di bawah tingkat kompleksitas tugas yang berbeda saat ini juga tengah terjadi di Indonesia. Kantor Akuntan Publik juga mengakui pentingnya insentif kinerja pada tugas audit dalam sebuah Kantor Akuntan Publik untuk menambah motivasi dan memperbaiki kinerja sesuai dengan

tujuan dan kualitas yang diharapkan oleh organisasi. Insentif kinerja bisa berbentuk material maupun nonmaterial, sedangkan pemberian insentif kinerja tergantung dari kebijakan Kantor Akuntan Publik dan kualitas dari kinerja yang telah dicapai. Mediasi usaha pada kinerja audit judgment tidak hanya dipengaruhi oleh insentif kinerja yang ditawarkan, tetapi juga perbedaan tingkat kompleksitas tugas yang dihadapi untuk menyelesaikan tugas-tugas audit.

Faktor persepsi etis, sering kali auditor dihadapkan pada sebuah kondisi dilematis yang melibatkan pilihan antara pertentangan nilai-nilai etis mereka dan kewajiban mereka untuk memiliki integritas serta obyektivitas yang tinggi. Auditor sering berhadapan dengan pengambilan keputusan yang tidak hanya cukup dengan standar akuntansi berterima umum tetapi juga kode etik. Kesadaran etika memegang peran yang penting bagi seorang auditor. Dapat dikatakan bahwa etika profesi merupakan ujung tombak dari suatu profesi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa profesi audit sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap kualitas jasa yang diberikannya. Sebagai profesi kepercayaan dan mengingat pentingnya peran akuntan publik maka etika adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa di negosiasikan lagi.

Penelitian mengenai *audit judgement* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Operasianti et al (2015) yang menguji skeptisme, insentif kerja, dan persepsi etis terhadap *audit judgement*

responden yang digunakan auditor KAP di kota Bandung, menyarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan responden yang bervariasi dan memperluas cakupan sampel yang digunakan. Pada penelitian Ariyanti et al (2014) yang menguji pengaruh tekanan ketaatan dan pengalaman auditor terhadap *audit judgement* memberikan kesimpulan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgement* dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap *audit judgement*. Hasil yang berbeda ditunjukkan dari penelitian Pektra dan Kurnia (2015) Tekanan ketaatan dan pengalaman auditor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit judgement*.

Namun demikian, masih ada ketidak konsistenan dari hasil penelitian mengenai *audit judgement* di Indonesia. Hal ini dikarenakan *judgement* auditor merupakan sebuah pertimbangan subyektif dari seorang auditor dan sangat tergantung dari persepsi individu mengenai suatu situasi. Selain itu hasil penelitian terdahulu juga belum dapat digeneralisir untuk seluruh Indonesia, sehingga membutuhkan tambahan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam membuat suatu *judgement*. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai *AUDIT JUDGEMENT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA*, khususnya di lingkungan auditor pemerintah.

Penelitian ini pada dasarnya mereplikasi penelitian Operasianti, et al (2015) dengan menambahkan variabel independen tekanan ketaatan dan pengalaman auditor yang di ambil dari penelitian Fitriana et al (2014). Dan

melakukan studi empiris pada BPK RI Jawa Tengah . Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Tekanan Ketaatan, Pengalaman Auditor, Skeptisme, Insentif Kerja, dan Persepsi Etis terhadap *Audit Judgement*. (Studi Empiris Pada BPK RI Jawa Tengah)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tekanan ketaatan kerja berpengaruh terhadap *audit judgement*?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap *audit judgement*?
3. Apakah skeptisme berpengaruh terhadap *audit judgement*?
4. Apakah insentif kerja berpengaruh terhadap *audit judgement*?
5. Apakah persepsi etis berpengaruh terhadap *audit judgement*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini digunakan untuk :

1. Menganalisis pengaruh tekanan ketaatan kerja terhadap *audit judgement*
2. Menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap *audit judgement*
3. Menganalisis pengaruh skeptisme terhadap *audit judgement*
4. Menganalisis pengaruh insentif kerja terhadap *audit judgement*
5. Menganalisis pengaruh persepsi etis terhadap *audit judgement*

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan melakukan penelitian ”Pengaruh Tekanan Ketaatan, Pengalaman Auditor, Skeptisme, Insentif Kerja dan Persepsi Etis Terhadap *Audit Judgement*” (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah), penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan serta memberikan pemahaman tentang pengaruh tekanan ketaatan, pengalaman auditor, skeptisme, insentif kerja dan persepsi etis terhadap *audit judgement* bagi auditor dan bagi akuntansi, diharapkan dapat menjadi kajian dalam proses pembelajaran akuntansi pada bidang pengauditan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi penelitian untuk melakukan penelitian selanjutnya serta memberikan pertimbangan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat digunakan penulis sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.
- b. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

kontribusi pengetahuan serta menambah referensi bagi auditor yang berguna untuk meningkatkan kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan *audit judgement*.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan ide yang mendasari dilaksanakan penelitian dan berisi latar belakang yang secara garis besar memuat hal-hal yang mengantarkan pada pokok permasalahan, rumusan masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang relevan tentang *audit judgement*, mendeskripsikan teoritis variabel penelitian yang meliputi *audit judgement*, tekanan ketaatan, pengalaman auditor, skeptisme, insentif kerja dan persepsi etis. Bab ini juga mencantumkan telaah penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, sumber dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pelaksanaan penelitian, statistik deskriptif, analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN